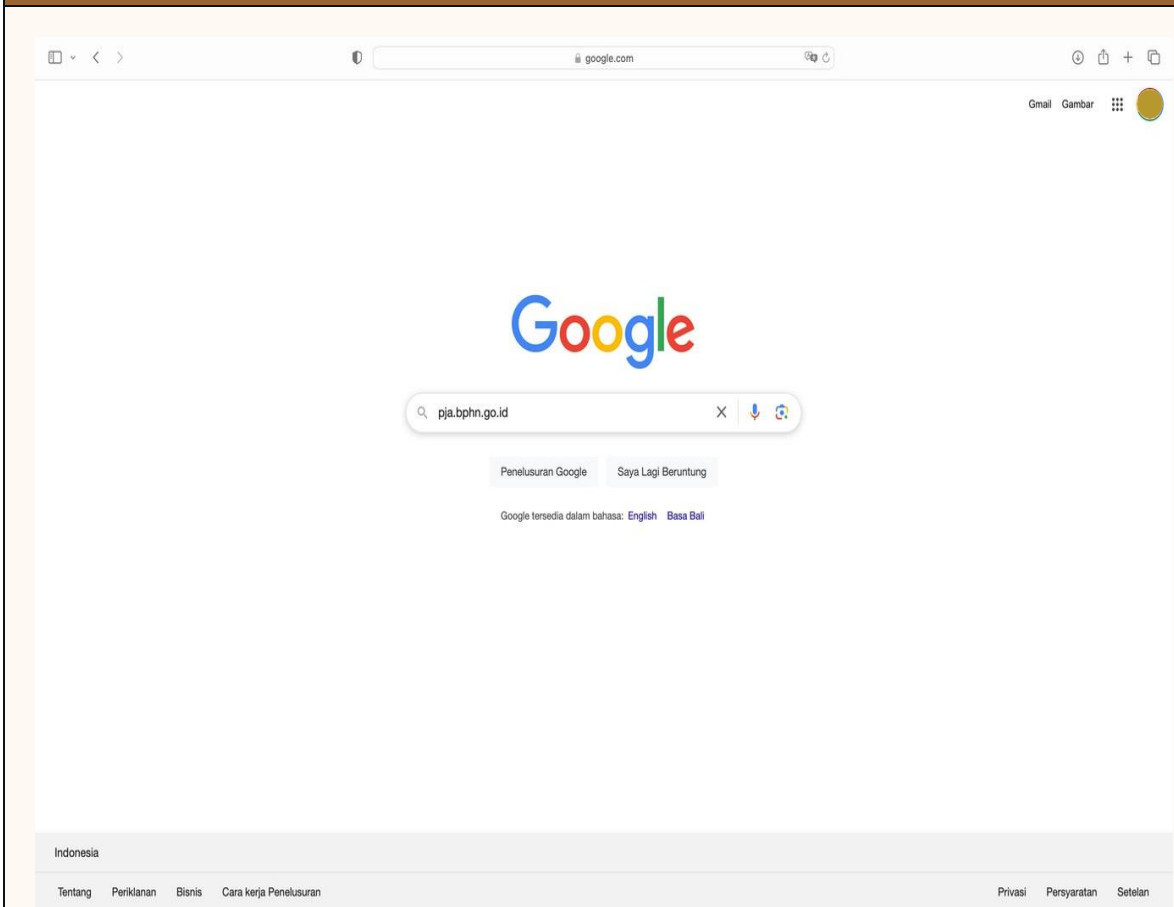


PENDAFTARAN *PARALEGAL ACADEMY* 2025

Pendaftaran dimulai dari tanggal 24 Jan s.d. 21 Feb 2025

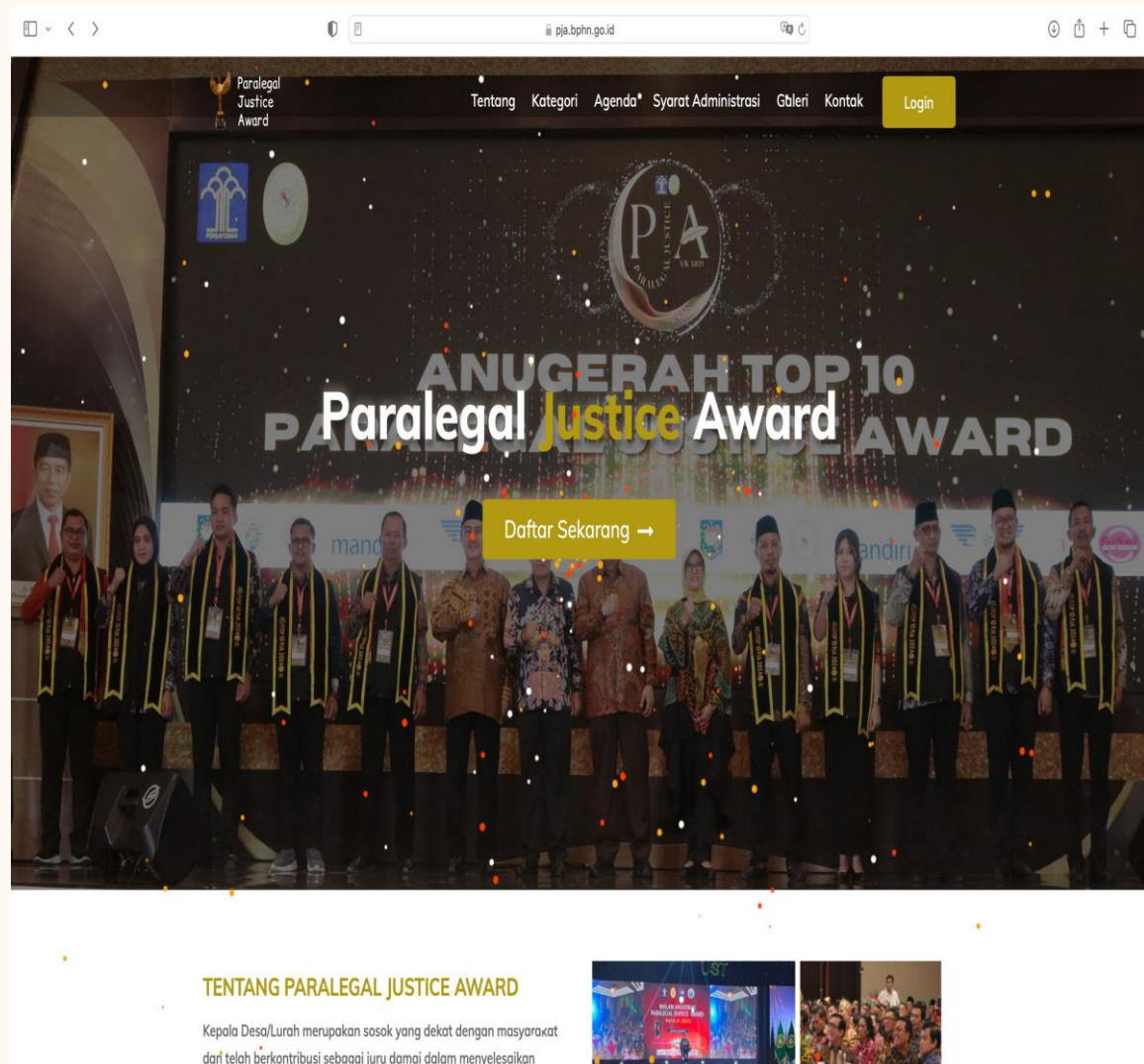
Pendaftaran melalui : <https://pja.bphn.go.id>

Mengakses Halaman Web Pendaftaran



Memasukkan *keyword* dalam search engine link: <https://pja.bphn.go.id>

Halaman Awal Website



Calon Peserta yang belum memiliki akun, melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengklik **“Daftar Sekarang”**

Isian Syarat Wajib

Pendaftaran Paralegal Justice Award

Silahkan masukan data Anda

BIODATA

DATA ADMINISTRASI

 Email *

 Nama Lengkap dan Gelar *

 Nomor Telepon *

 Jabatan *

 Provinsi *

SELANJUTNYA

© 2025 BPHN

Data Administrasi

Pendaftaran Paralegal Justice Award

Silahkan masukan data Anda

BIODATA

DATA ADMINISTRASI

Pas Foto Berpakaian Dinas Kepala Desa/Lurah (PDU Putih)
dengan Latar Belakang Merah *



PILIH

Kartu Tanda Penduduk
(KTP) *



PILIH

Daftar Riwayat Hidup *



PILIH

Calon Peserta diwajibkan untuk melampirkan data administrasi pendaftaran, antara lain:

1. Pas Foto Berpakaian Dinas Kepala Desa/Lurah (PDU Putih, *close up* setengah badan);
2. Identitas Diri berupa KTP;
3. Daftar Riwayat Hidup (berisi informasi pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, serta Prestasi dan penghargaan yang pernah didapatkan), **dengan format PDF**.

Data Administrasi

Surat Pernyataan bersedia mengikuti Paralegal Academy *
(download template di sini)



Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah *



4. Surat Pernyataan bersedia mengikuti Paralegal Academy yang di TTD oleh Calon Peserta, **dengan format PDF**; (terlampir template penulisan surat pernyataan)

CONTOH FORMAT SURAT
PERNYATAAN KEPALA DESA/LURAH

LOGO
INSTANSI

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA....
DESA/KELURAHAN....
Alamat....
Telepon....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa, apabila saya dinyatakan lulus seleksi, maka saya bersedia mengikuti *Paralegal Academy* yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 12 s.d. 14 Maret 2025 secara daring. Saya akan mematuhi segala ketentuan selama pembelajaran dan bersedia beriklan sanksi apabila melakukan pelanggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat pendaftaran *Paralegal Academy* yang merupakan rangkaian dari kegiatan *Paralegal Justice Award 2025*.

Tempat, Tanggal

TTD dan Stempel

Nama

5. Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan Calon Peserta merupakan Kepala Desa/Lurah Aktif menjabat saat ini, **dengan format PDF**.

Data Administrasi

Surat Perintah/Surat Tugas dari Camat sebagai rekomendasi mengikuti rangkaian kegiatan Paralegal Justice Award *
([download template di sini](#))



↑ PILIH

SK Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dilampiri dokumentasi Posbankum dan Balai Mediasi Desa/Kelurahan *



↑ PILIH

Surat Pernyataan tidak sedang terlibat kasus hukum *



↑ PILIH

6. Surat Perintah/Surat Tugas dari Camat sebagai Rekomendasi mengikuti rangkaian Kegiatan Paralegal Justice Award, **dengan format PDF**; (terlampir template penulisan surat perintah/surat tugas)

CONTOH FORMAT SURAT
PERINTAH KEPALA DESA/LURAH

NAMA INSTANSI

LOGO INSTANSI

Jalan

Telepon Faksimili

Laman: Email:

SURAT PERINTAH

Dasar : Dalam rangka mengikuti kegiatan Seleksi *Paralegal Academy* bagi Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* dan Anugerah *Paralegal Justice Award 2025*.

MEMERINTAHKAN :

Nama :
NIP (Lurah) :
Jabatan :

Untuk mengikuti rangkaian kegiatan *Paralegal Justice Award 2025* bagi Kepala Desa/Lurah.

Tempat, Tanggal
Nama Jabatan

Pejabat Yang Berwenang

Tembusan:

1.
2.

7. Surat Keputusan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/Kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dengan bukti dokumentasi, **dengan format PDF**; (terlampir template penulisan SK Pembentukan Posbankum)

KOP DESA/KELURAHAN (untuk SK yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah)

Lambang Garuda
untuk SK yang
dikeluarkan oleh
Kepala Desa

KEPALA DESA/LURAH
KEPUTUSAN KADES/LURAH DESA/LURAH
KECAMATAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
(... DESA/KELURAHAN ...)

DESA/KELURAHAN

Menimbang :

- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah ... tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan ...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Desa . . . (silahkan ditambahkan jika ada).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM (DESA/KELURAHAN)
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbantuan Desa/Kelurahan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan ;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa/Lurah melalui TP PKK Desa/Kelurahan ; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di (. . . alamat . . .)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota . . .
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di
Pada Tanggal : 2025
Kepala Desa/Lurah

Nama

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR :
Tanggal :

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN (....nama desa/kelurahan....)

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN

Kepala Desa/Lurah

Nama

8 . Surat Pernyataan tidak sedang terlibat kasus hukum, **dengan format PDF**; (terlampir template penulisan Surat Pernyataan)

LOGO
INSTANSI

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
DESA/KELURAHAN.....
Alamat.....
Telepon.....

CONTOH FORMAT SURAT
PERNYATAAN KEPALA DESA/LURAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan program prioritas pemerintah dan program peningkatan kesadaran hukum di desa/kelurahan, saya tidak sedang terlibat permasalahan hukum dengan kategori *Extraordinary Crime* yaitu:

1. Korupsi;
2. Terorisme;
3. Narkotika;
4. dan/atau tindak pidana lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat pendaftaran Paralegal Academy yang merupakan rangkaian dari kegiatan Paralegal Justice Award 2025.

Tempat, Tanggal

TTD & STAMPEL

Nama lengkap

Persyaratan Substansi

Uraian singkat pengalaman penyelesaian sengketa di wilayahnya * ?



PILIH

Pengalaman dan Inovasi
(Semuanya digabungkan kedalam 1 file PDF) * ?



PILIH

Dokumentasi berupa video penyelesaian sengketa hukum *



Pranala (link) berita di media massa dan/atau media sosial terkait penyelesaian sengketa *



SEBELUMNYA

SIMPAN

9. Uraian singkat pengalaman penyelesaian sengketa di wilayahnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Maksimal 3 halaman
 - Format file PDF**
 - Ukuran kertas A4
 - Font size 12
 - Jenis huruf Arial
 - Spasi 1.5

10. Pengalaman dan Inovasi, berupa: **(dengan format PDF dan dalam 1(satu) File)**

- a. Bukti Perdamaian, baik antar masyarakat desa/kelurahan, antar masyarakat desa/kelurahan lain, atau antar masyarakat desa/kelurahan dengan perusahaan di desa/ kelurahan; atau
- b. Peraturan Desa, Desa Adat, atau Kebijakan Lurah berupa Bukti Kebijakan mengenai penyelesaian sengketa di Desa/Kelurahan; atau
- c. Sertifikat Pelatihan, Piagam Penghargaan, atau bentuk penghargaan lain dalam mendukung penyelesaian sengketa di wilayahnya.

11. Dokumentasi berupa Video penyelesaian sengketa hukum, dengan ketentuan:

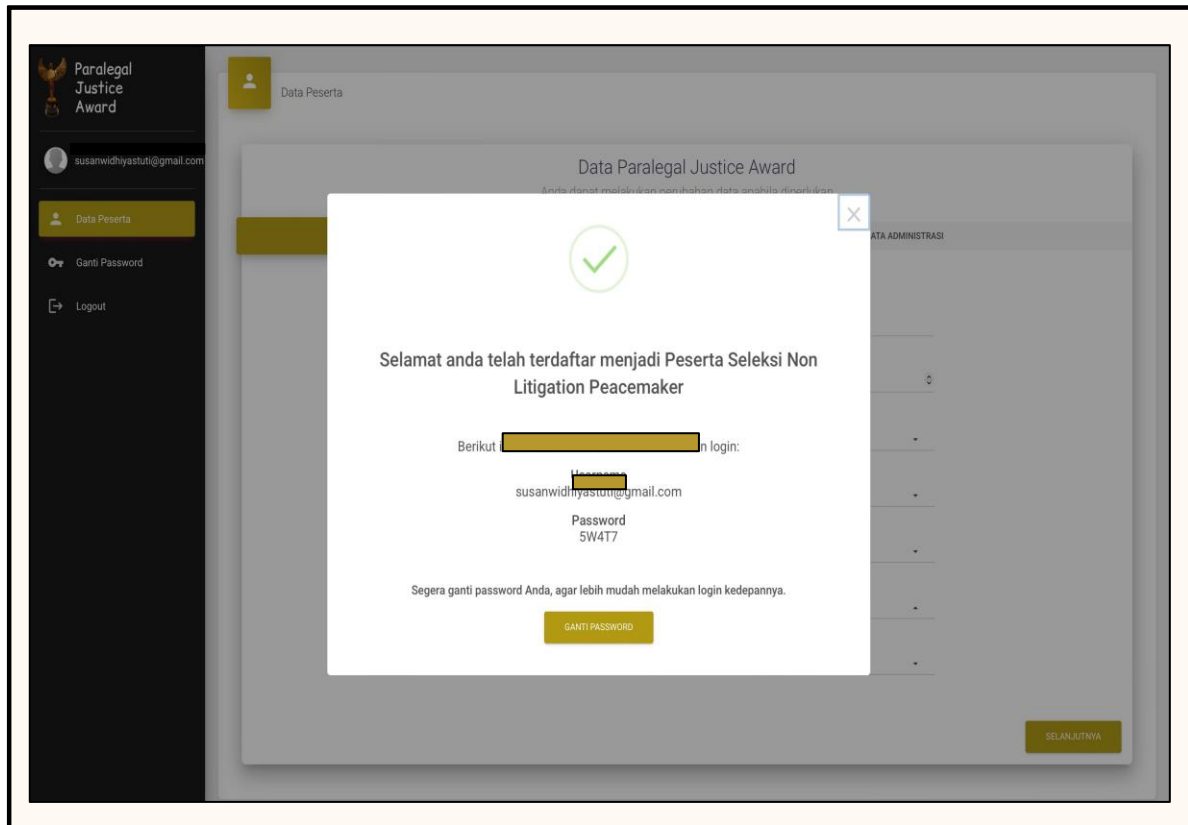
- a. **Wajib unggah video** dokumentasi Anda di **youtube**, yang diinput dalam sesi ini ialah link videonya tersebut;
- b. Video dapat berupa kompilasi foto, yang tentunya berisi narasi/voice over uraian singkat permasalahan hukum yang sedang diselesaikan.

12. Pranala (link) berita di media massa dan/atau media sosial terkait penyelesaian sengketa/permasalahan hukum.

Calon Peserta yang telah melengkapi seluruh data dukung dapat melakukan submit atau mengirim data dengan mengklik menu

“SIMPAN”

Notifikasi Data Terkirim



Calon Peserta yang telah berhasil mendaftarkan diri, dan mengirim data dukung portofolio akan memperoleh Notifikasi berikut (contoh terlampir), Calon Peserta **wajib menyimpan data berisi akun dan password** tersebut untuk dapat melakukan perubahan data apabila diperlukan selama jangka waktu pendaftaran dibuka.

“Sebelum melakukan pendaftaran, sebaiknya memastikan seluruh data dukung telah terpenuhi. Agar proses pendaftaran tidak terhambat”

- Panitia Paralegal Academy dan Paralegal Justice Award 2025 -